

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pasca Sarjana.
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ariman, H.M. Rasyid. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Arto, A. Mukti. 2001. *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djojodurdjo, M. A. Moegni. 1976. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Husein, Ali. 1997. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ishaq. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Muhajir, Noeng. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin.
- Nieuwenhuis, J.H. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purwono, Joko. 1995. *Pengantar Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Negeri Solo Press.
- Prajonto, Eddy. 2006. *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*. Bandung: Utomo.

- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radjawali Pers.
- Soemitro, Ronny. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Dyah. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.
- Setiabudi, Jaya. 2013. *Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Trachtman, Joel P. 2013. *The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win*. South Carolina: Createspace Independent Publishing.
- Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal, Thesis, dan Wawancara :

- Ali Khaidar, diwawancarai oleh Windy Fariskya Handoko, 31 Januari 2023, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Ashadi L. Diab. 2014. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, dan Social Welfare". Jurnal Al-'Adl. Vol. 7 No. 2.
- Asto Legowo. 2017. "Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing". Jurnal Arena Hukum. Vol. 10 No. 1.
- Dewandaru, dkk. 2020. "Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional". Jurnal NOTARIUS, Vol. 13 No. 1.
- Fingli A. Wowor. 2014. "Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah". Lex Privatum, Vol. II No. 2.
- Habibi. 2007. "Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu". Thesis. Universitas Diponegoro.

- Imam Koeswahyono. 2008. *"Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum"*. Jurnal Konstitusi. Vol. I No. 1.
- Manaon Damianus Sirait, dkk. *"Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor"*. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 No. 2.
- Nurfaqih Irfani. 2020. *"Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum"*. Jurnal Legilasi Indonesia. Vol. 16 No. 3.
- Santoso. 2013. *"Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguasaan Atas Tanah"*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13 No. 1.
- Slamet. 2013. *"Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi"*. Lex Jurnalica. Vol. 10, No. 2.
- Sri Redjeki Slamet. 2013. *"Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi"*. Lex Jurnalica, Vol. 10 No. 2.
- Tatit Januar Habibi. 2007. *"Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu"*. E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Urip Santoso. 2013. *"Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguasaan Atas Tanah"*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 1.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

C. Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 610K/Sip/1968
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakan Selanjutnya

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

D. Sumber *Online* :

- Ana Silviana. 2014. "HPL Bukan Merupakan Hak Atas Tanah sebagaimana HM, HGU, HGB, dan HP". 26 Maret. Diakses pada 20 Desember 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/4972/HPL-Bukan-Merupakan-Hak-atas-Tanah-sebagaimana-HM-HGU-HGB-dan-HP.html>
- Arip Budiyanto. 2020. "Pengamanan Barang Milik Negara Dalam Rangka Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum", 23 April. Diakses pada 31 Januari 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13043/Pengamanan-Barang-Milik-Negara-Dalam-Rangka-Tertib-Administrasi-Tertib-Fisik-dan-Tertib-Hukum.html%20pada%2014%20Februari%202022>
- Geologinesia. 2019. "Apa itu Tanah? Pengertian, Proses Pembentukan, dan Profil Lapisannya". 28 Desember. Diakses pada 2 Februari 2023. <https://www.geologinesia.com/2019/12/pengertian-tanah.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. "Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", 09 November. Diakses pada 28 Maret 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html#:~:text=Ajaran%20kausalitas%20dalam%20hukum%20perdata,si%20pelaku%20dapat%20dimintakan%20pertanggungjawaban>